

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023



KABUPATEN TABANAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dituangkan tiap tahun, sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabanan.

Tabanan, 2 Agustus 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tabanan,



Ni Dewa Ayu Putu Sri Widyanti, SP., M.Si.

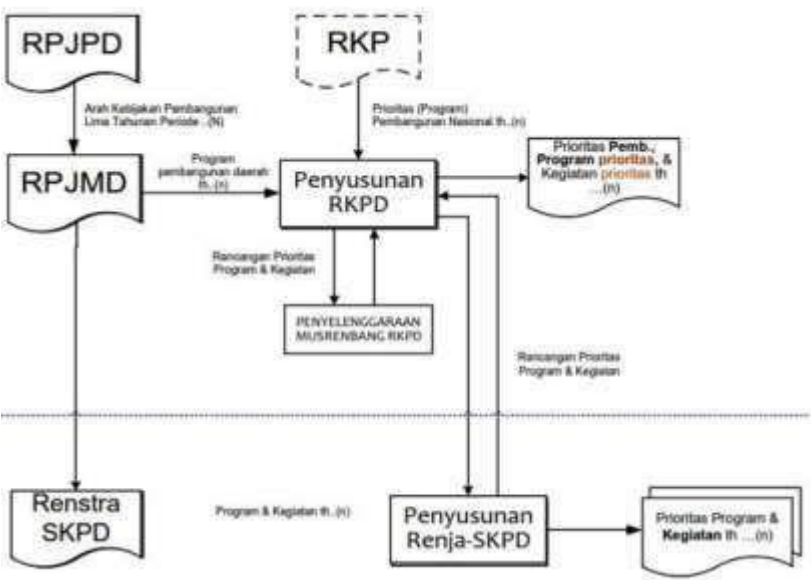
Pembina Utama Muda /(IV/c)

NIP. 19681124 200212 2 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD. Jadi Renja OPD merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang telah disesuaikan dengan RKPD yang dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.
Bagan Alir Hubungan antara Penyusunan
Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Sebagai salah satu dokumen perencanaan, rencana kerja senantiasa terkait dengan dokumen-dokumen lainnya. Dengan demikian rencana kerja menjadi alat untuk mengeksekusi berbagai kebijakan pemerintah daerah yang secara langsung menjadi tugas pokok dan fungsi OPD penanggung jawab. Rencana kerja akan menjadi bahasa implementasi setiap tahun atas Renstra OPD dan mengacu pada RKPD. Berhasil tidaknya apa yang direncanakan pemerintah daerah dalam RKPD yang berkaitan erat dengan sinkronisasi antara program dan kegiatan pada masing-masing OPD melalui rencana kerja pada setiap OPD. Rencana kerja memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya rencana kerja disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan Kinerja akan dipertanggungjawabkan dalam capaian kinerjanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKJIP).

1.2. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- m) Peraturan Bupati Tabanan No. 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan dengan maksud untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023 bagi seluruh aparatur lingkup Dinas Ketahanan Pangan guna mewujudkan tujuan yang diharapkan. Tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan adalah untuk menyediakan dokumen yang digunakan untuk mempertajam prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien antara lain : penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyusunan Perjanjian Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun lalu (tahun n-2) tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Kegiatan :

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

C. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan :

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

D. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Kegiatan :

1. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

E. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Dinas Ketahanan Pangan s/d Tahun 2022 Kabupaten Tabanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan : Wajib									
	Bidang Urusan : Pangan									
	Program : Pelayanan Administrasi Kantor	Presentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	100%	100%	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan : Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	100%	-	100%	78,94%	78,94%	100%	100%	100%
	Kegiatan :									
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen perencanaan dan	3 dok	-	3 dok	3 dok	100%	3 dok	3 dok	100%

				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	evaluasi yang tersedia								
				a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	-	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
				b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	1 lap	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang/bulan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	2 laporan	-	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
				3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi Umum perangkat daerah	100%	-	100%	97%	97%	100%	97%	97%
				a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	12 paket	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				d. Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dok	-	100%	0	0	100%	100%	100%
				f. Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	7 paket	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 lap	-	100%	0	0	100%	100%	100%
				h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dok	-	-	-	-	100%	100%	100%
				4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	-	100%	0	0	0	0	0
				a. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	-	100%	0	0	0	0	0
				5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	-	100%	76,67%	76,67%	100%	100%	100%

				a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 lap	-	100%	35%	35%	100%	100%	100%
				b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	-	100%	95%	95%	100%	100%	100%
				c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lap	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	7 unit	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Program : Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	100%	84%	-	-	-	-	-	-

				Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	1 paket	-	-	-	-	-	-
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Serapan Anggaran Sesuai Target	100%	92,16%	-	-	-	-	-	-
				Kegiatan : 1. Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen Renstra, Renja dan Lakip	3 dok	3 dok	-	-	-	-	-	-
				Kegiatan : 2. Pendataan Aset	Jumlah dokumen Aset yang tersedia	2 dok	2 dok	-	-	-	-	-	-
				Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Presentase Desa mandiri pangan	10%	Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan	-	-	-	-	-	-
				Kegiatan : 1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA)	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan (Peta FSVA)	1 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-
				2. Pemantapan Kawasan Mandiri Pangan	Laporan database kawasan desa mandiri pangan	1 dok	1 dok	-	-	-	-	-	-
				3. Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah data ketersediaan dan rawan pangan	3 data	3 data	-	-	-	-	-	-
				4. Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah pertemuan koordinasi yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	-	-	-	-	-	-
				5. Monitoring dan	Terpantaunya jumlah	10 kec	-	-	-	-	-	-	-

				Pengawasan Kinerja Penggilingan Padi (RMU)	unit penggilingan padi								
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa mandiri pangan	10%	-	10%	10%	100%	-	-	-
				1. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah data ketersediaan dan rawan pangan	3 data	-	3 data	3 data	100%	-	-	-
				a. Koordinasi dan Sinkronisasi dan Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	3 data	-	3 data	3 data	100%	-	-	-
				b. Pelaksanaan, Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengisian cadangan pangan	1 gudang	-	1 gudang	1 gudang	100%	-	-	-
				Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Jumlah Desa yang Memiliki Percontohan Pemanfaatan Pekarangan untuk Penyediaan Pangan Sehat	45%	42,11%	-	-	-	-	-	-
				Kegiatan : 1. Lomba Cipta Menu Pangan Lokal Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatnya partisipasi wanita dalam penyediaan pangan keluarga	10 kec	10 KWT	-	-	-	-	-	-

				2. Pengawasan dan Pengamanan Mutu Pangan	Jumlah lokasi pengambilan sampel bahan makanan yang diuji	10 klp	10 klp	-	-	-	-	-	-
				3. Pemberdayaan Pekarangan Pangan	Jumlah kelompok yang mengembangkan tanaman pangan keluarga pada pekarangan rumah	2 klp	2 klp	-	-	-	-	-	-
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan, akses, dan pemafaatan pangan	10%	-	10%	10%	100%	85%	85%	100%
				1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan dan penyaluran pangan	90%	-	90%	90%	100%	80%	80%	100%
				a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 lap	-	-	-	-	1 data	1 data	100%
				b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	1 lap	-	3 klp	3 klp	100%	10 KWT	10 KWT	100%
				c. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	1 dok	-	10 kec	10 kec	100%	1 data	1 data	100%
				d. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia yang dikembangkan	3 unit	-	3 klp	3 klp	100%	3 klp	3 klp	100%

				2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun	Persentase capaian target konsumsi pangan	80%	-	80%	80%	100%	80%	80%	100%
				a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	2 lap	-	8 klp	8 klp	100%	2 klp	2 klp	100%
				b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	1 lap	-	15 unit	15 unit	100%	10 kec	10 kec	100%
				3. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase lokasi rentan rawan pangan yang tertangani	58%	-	-	-	-	-	-	-
				a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	3 lap	-	-	-	-	-	-	-
				b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana kebutuhan pangan lokal	1 dok	-	-	-	-	-	-	-
				c. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	15 ton	-	-	-	-	-	-	-
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase desa mandiri pangan	10%	-	10%	10%	100%	-	-	-
				1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	85%	-	85%	85%	100%	-	-	-

				a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah lokasi uji sampel bahan pangan segar	10 pasar	-	10 pasar	10 pasar	100%	-	-	-
				Program Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Presentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	-	-	-	-	-	-
				Kegiatan : 1. Pengembangan Cadangan Pangan	Pengisian gudang	1 gudang	1 paket	-	-	-	-	-	-
				2. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Data harga pangan dan pasokan pangan	1 paket	1 tahun	-	-	-	-	-	-
				3. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan	Jumlah jenis dokumen pengawalan lembaga distribusi pangan	1 jenis	-	-	-	-	-	-	-
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase desa mandiri pangan	10%	-	10%	10%	100%	Persentase ketersediaan infrastruktur pangan (100%)	-	-
				1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah/ Kabupaten	Persentase penyediaan infrastruktur kawasan cadangan pangan terintegrasi	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-
				a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersedianya bangunan lumbung pangan masyarakat	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
				b. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Tersedianya lantai jemur	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
				c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung	Tersedianya mesin RMU dan rumah RMU	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	-	-	-

				Kemandirian Pangan Lainnya									
--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabanan, 2 Agustus 2022
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tabanan,



Ni Dewa Ayu Putri Sri Widyanti, SP., M.Si.

Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19681124 200212 2 004

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 yang di bawah target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat karena adanya rasionalisasi/refocusing anggaran dan kendala pada harga penjual yang melebihi standar harga sehingga tidak memenuhi target yang direncanakan.

- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Penanganan Kerawanan Pangan serta Program Pengawasan Keamanan Pangan rata-rata 100%

- Realisasi sub kegiatan yang melebihi target hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2021 adalah pada Kegiatan Pelaksanaan Target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan target 45% tercapai 64,66%.

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Walaupun program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 umumnya memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tetapi kendala/masalah yang dihadapi tetap ada.

Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain :

- Dinas Ketahanan Pangan dengan kualitas dan kuantitas sumber daya aparturnya yang terbatas sehingga perlu ditingkatkan
- Sinkronisasi antara Renstra OPD dengan RPJMD/ RKPD masih perlu dievaluasi
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan
- Revisi /Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang memerlukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan
- Rasionalisasi anggaran akibat pandemi covid 19
- Terbatasnya anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan pada OPD

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 target capaian program berimplikasi pada banyaknya kegiatan-kegiatan baru yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan/sasaran OPD yang diikuti dengan pengajuan anggaran kegiatan yang diusulkan.
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
 Dengan timbulnya rumusan perencanaan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021 beberapa hal yang perlu mendapat tindak lanjut adalah :
 - Evaluasi indikator program dan kegiatan agar lebih tepat sasaran
 - penajaman prioritas program/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran OPD
 - tetap melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk usulan-usulan program/kegiatan yang direncanakan.
 - Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri No 90 Tahun 2019 dimulai pada tahun anggaran 2021.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sesuai dengan Permentan Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdapat empat (4) jenis SPM yaitu :

1) Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Indikator :

- a. Ketersediaan energi dan protein per kapita
- b. Penguatan cadangan pangan

2) Distribusi dan Akses Pangan

Indikator :

- a. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
- b. Stabilitas harga dan pasokan pangan

3) Penganekaragaman dan keamanan pangan

Indikator :

- a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
- b. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

4) Penanganan Kerawanan Pangan

Indikator :

- a. Penanganan daerah rawan pangan

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tabanan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai LKJIP	-		70 B	72 B	73 B	74 B	65 B	-	65 B	70 B	Penilaian oleh instansi auditor
			Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	100%	100%	100%	78,24%	-	90%	90%	
2	Rasio ketersediaan komoditas pangan strategis nasional terhadap kebutuhan masyarakat	-		75%	80%	85%	90%	-	-	80%	85%	Terdapat perbedaan indikator pada tahun 2021 dengan tahun 2022 dst karena tahun 2021 kegiatan masih

												mengacu pada renstra 2016-2021
			Persentase ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan	75%	80%	85%	90%	-	-	60%	65%	Data ketersediaan, kebutuhan dan konsumsi pangan tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kualitas pangan utama	-	Persentase ketersediaan infrastruktur pangan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan untuk mendapatkan kegiatan DAK fisik dari pusat.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Dalam upaya melaksanakan pembangunan ketahanan pangan, kinerja Dinas Ketahanan Pangan diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Tabanan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan merupakan OPD yang baru berdiri pada akhir tahun 2016, yang sebelumnya sebagai Kantor Ketahanan Pangan sehingga tetap perlu banyak perbaikan dan evaluasi untuk penyusunan perencanaan dalam menentukan arah prioritas tujuan dan sasaran OPD ke depannya mengingat diperlukan data awal yang mendukung program/kegiatan yang akan dilaksanakan.

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
 - 1) Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman sayur
 - 2) Ketersediaan pangan tidak merata sepanjang tahun (sifat musiman) dan tidak semua wilayah adalah sentra pangan
 - 3) Perhitungan cadangan pangan hanya berdasarkan proyeksi tanam/panen (sulit menghitung cadangan pangan di masyarakat)
 - 4) Konsumsi beras relatif cukup tinggi dan ketergantungan pada beras
 - 5) Konsumsi pangan lokal terbatas karena semakin berkembangnya pangan olahan pabrikan
 - 6) Distribusi pangan tidak optimal karena belum adanya pasar-pasar khusus pangan (yang dikelola pemerintah maupun swasta)
 - 7) Belum intensifnya promosi dan fasilitasi pemasaran karena keterbatasan dana dan kemampuan
 - 8) Belum optimalnya pengawasan peredaran pangan segar asal tumbuhan
- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir RPJMD Kabupaten Tabanan, tahun yang diperlukan percepatan proses pelaksanaan pembangunan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Masih banyak hal yang harus diselesaikan, masih perlu pembenahan untuk mengefektifkan pencapaian tujuan. Karena tantangan ke depan jauh lebih sulit karena dihadapkan pada menurunnya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan akibat beberapa fenomena dalam hal pendapatan dan pandemi covid19. Tahun 2021 Kabupaten Tabanan masih

dihadapkan pada belum optimalnya pertumbuhan kegiatan ekonomi bidang pertanian. Petani belum dapat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi bahkan mereka semakin terpuruk dengan keadaan cuaca yang tidak menentu dan kondisi pandemi covid19. Di sektor hulu petani belum secara efektif melakukan pengolahan bersama produk pertanian mereka. Hal ini terjadi karena banyak petani belum mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam mengolah dengan memanfaatkan teknologi terkini. Selain itu kendala tempat pengolahan bersama juga menjadi permasalahan ketika mereka berhasil membentuk kelompok. Untuk itu perlu upaya pendampingan yang efektif dan efisien secara berkelanjutan dalam periode tertentu. Pendampingan itu harus dilakukan secara profesional dengan niat yang tulus untuk membangun pusat pertumbuhan produksi pengolahan hasil pertanian. Selain itu untuk distribusi produk masyarakat juga terdapat BUMDes yang menjadi rantai penting distribusi pertanian, diharapkan dapat berperan aktif mendukung sektor pertanian. Untuk itu kedepannya perlu dilakukan pembinaan khusus pada BUMDes.

Tahun 2022 merupakan awal dari RPJMD, Renstra OPD yang menyesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah untuk selanjutnya dipakai acuan untuk perumusan RKPD dan Renja OPD. Adanya penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimulai pada tahun 2021 sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2021 sehingga tahun 2022 merupakan tahun kedua dengan program dan kegiatan yang baru dengan sistem kodifikasi dan nomenklatur yang juga baru.

o Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Kabupaten Tabanan adalah :

- Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan
- Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani di saat panen raya
- Adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor
- Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal dari sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil
- Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras/padi dan terjadi pergeseran pola konsumsi ke arah konsumsi berbahan baku terigu/gandum.

Peluang yang ada dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Kabupaten Tabanan :

- Besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Tabanan
 - Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat
 - Wilayah Kabupaten Tabanan yang luas dan merupakan daerah lumbung beras serta menyediakan peluang usaha distribusi pangan.
 - Perkembangan teknologi informatika, perhubungan dan transportasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan
 - Ketersediaan sumber daya lahan dan air sebagai faktor utama produksi untuk menghasilkan pangan, belum dikelola secara optimal
 - Keragaman sumber daya alam dan keanekaragaman hayati baik flora dan fauna belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pangan untuk mendukung peningkatan konsumsi masyarakat sekaligus mempertahankan kelestariannya
 - Ketersediaan lahan pertanian cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal
 - Semakin berkembangnya riset dan teknologi pangan yang telah menghasilkan berbagai varietas tanaman pangan yang tahan terhadap kondisi tidak optimal namun tetap berproduksi tinggi. Demikian pula untuk hortikultura dan peternakan.
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
- Kebijakan, program dan kegiatan prioritas, mendukung pementapan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal
 - Kelembagaan ketahanan pangan masyarakat yang makin konsisten berpartisipasi dalam mengelola proses produksi, pengolahan, pemasaran dan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Ketahanan Pangan menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan, LSM, asosiasi, OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi serta pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kab/Kota. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. Usulan program /kegiatan tahun 2023 berdasarkan kajian di bidang-bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan mengingat pemberlakuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 diperlukan data awal maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD sehingga program/kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

- 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

- 2) Administrasi Keuangan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD

- 3) Administrasi Umum

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- f. Penyediaan Bahan/Material
- g. Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 - b. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
 - c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan :
 - 1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan
 - a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
 - b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - c. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
 - d. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
 - 2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
 - c. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 3) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita/ Tahun

Tabel 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100% Rp 4.537.207.550	
A	Kegiatan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	3 dok Rp 5.000.000	
	1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok Rp 3.000.000	
	2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 lap Rp 2.000.000	
B	Administrasi Keuangan	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100% Rp 4.074.716.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tabanan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang/bulan Rp 4.069.716.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Tabanan	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	2 lap Rp 5.000.000	
C	Administrasi Umum	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100% Rp 136.500.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tabanan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket Rp 2.500.000	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tabanan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket Rp 6.500.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tabanan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket Rp 49.000.000	

4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tabanan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket Rp 7.000.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dok Rp 3.000.000	
6	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tabanan	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	7 paket Rp 18.500.000	
7	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 lap Rp 50.000.000	
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dok Rp 0	
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Presentase terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100% Rp 50.000.000	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabanan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit Rp 50.000.000	
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Presentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Rp 213.000.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tabanan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 lap Rp 1.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tabanan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap Rp 30.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tabanan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lap Rp 199.995.900	
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Presentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100% Rp 39.995.650	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kab. Tabanan	Jumlah kendaraan dinas operasional	7 unit Rp	

	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24.995.650	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Tabanan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit Rp 15.000.000	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Kab. Tabanan	Persentase penyediaan infrastruktur pangan (100%)	100% Rp 0	
A	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Persentase penyediaan infrastruktur kawasan cadangan pangan terintegrasi	100% Rp 0	
1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Kab. Tabanan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	1 unit Rp 0	
2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Kab. Tabanan	Jumlah lantai jemur yang tersedia	1 unit Rp 0	
3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kab. Tabanan	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	1 unit Rp 0	
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kab. Tabanan	Persentase ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	85% Rp 949.634.589	
A	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Tabanan	Persentase ketersediaan dan penyaluran pangan	80% Rp 174.634.589	
1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Tabanan	Informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 lap Rp 78.134.589	
2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Tabanan	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	1 lap Rp 50.000.000	
3	Pemantauan Stok,	Kab.	Pemantauan stok,	1 dok	

	Pasokan dan Harga Pangan	Tabanan	pasokan dan harga pangan	Rp 21.500.000	
4	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kab. Tabanan	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat yang dikembangkan	3 unit Rp 25.000.000	
B	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Persentase lokasi rentan rawan pangan yang tertangani	58% Rp 225.000.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	3 lap Rp 15.000.000	
2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Tabanan	Rencana kebutuhan pangan lokal	1 dok Rp 60.000.000	
3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	1 gudang Rp 150.000.000	
C	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Tabanan	Persentase capaian target konsumsi pangan	80% Rp 550.000.000	
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Tabanan	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	2 lap Rp 300.000.000	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita/ Tahun	Kab. Tabanan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	1 lap Rp 250.000.000	
		JUMLAH		5.486.842.139	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten

Berdasarkan kondisi umum, daya dukung dan daya tampung, isu strategis prioritas serta capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan alternatif skenario yang diberikan, maka secara khusus Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merekomendasikan pengembangan dan pembangunan kewilayahan bercorak *conservationism* dengan mengutamakan sektor pertanian dan perkebunan sebagai keunggulan wilayah yang dapat dikembangkan untuk pemulihan dan peningkatan kondisi ekonomi masyarakat dan wilayah namun tetap mengikutsertakan sektor pariwisata sebagai bonus keunggulan.

Pembangunan bidang urusan pangan dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan berpedoman pada Peraturan Menteri/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/miskin. Penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Tabanan sampai saat ini telah dapat dikatakan cukup berhasil yang terindikasi dari tidak adanya daerah rawan pangan. Sebagai daerah agraris, Tabanan masih merupakan sentra produksi padi, palawija, ternak, dan ikan. Dihitung dari jumlah produksi beras dan konsumsi seluruh penduduk Tabanan, produksi beras di Kabupaten Tabanan masih surplus, rata-rata 57.000 ton per tahun. Upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan terus digalakkan untuk mendukung ketersediaan jenis pangan lainnya, seperti: tomat, cabe, dan sayur mayur lainnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan (dalam Renstra 2021-2026) adalah sebagai berikut :

✓ Tujuan :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik
2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan menuju kemandirian pangan

- ✓ Sasaran :
- 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional
 - 3. Memperkuat distribusi pangan

Tujuan Renja adalah untuk menyediakan dokumen yang digunakan untuk mempertajam prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sasaran Renja adalah OPD dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan beserta seluruh aparatur yang melekat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

- o Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yaitu:

Visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)*”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut akan ditempuh dengan 3 (tiga) Misi pembangunan sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman dan Nyaman Dalam Perikehidupan (Aman)
- 2. Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)
- 3. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi di Berbagai Bidang Yang Berkepribadian dalam Kebudayaan (Madani)

MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi di Berbagai Bidang Yang Berkepribadian dalam Kebudayaan (Madani)



TUJUAN 3 : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan



SASARAN 3.2 : Terwujudnya ketersediaan pangan utama



SASARAN 2.2 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah

INDIKATOR SASARAN :

- 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
- 2. Indeks Reformasi Birokrasi

Misi yang ingin dicapai pada sub sektor ketahanan pangan pada misi 3 yaitu :

Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi di Berbagai Bidang Yang Berkepribadian dalam Kebudayaan (Madani)

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan

Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik

Indikator Sasaran : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran 2 : Terwujudnya ketersediaan pangan utama

Indikator Sasaran : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

o Pencapaian SDGs

Fokus bidang kegiatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditinjau dari aspek pertumbuhan PDRB / Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, PDRB Per Kapita, Distribusi Pendapatan dan Persentase Kemiskinan. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini sejalan dengan indikator SDGs yaitu tanpa kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

o Pengentasan kemiskinan

Kemiskinan di Kabupaten Tabanan Tahun 2020 berada pada angka tertinggi kelima setelah dibandingkan dengan Sembilan Kabupaten/Kota se-Bali yakni Kabupaten Karangasem, Buleleng, Klungkung dan Jemberana dan masih di atas rata-rata angka kemiskinan di Bali. (BPS, *Tabanan Dalam Angka 2021*)

	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Bali (Ribu Jiwa)	178,18	180,13	171,76	163,85	165,19
Kab. Tabanan (Ribu Jiwa)	21,9	21,66	19,77	18,74	19,11

Provinsi Bali (%)	4,25	4,25	4,01	3,79	3,78
Kab. Tabanan (%)	5	4,92	4,46	4,21	4,27

Adapun beberapa cara yang bisa diusahakan yaitu dengan menumbuhkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, mengelola produksi pangan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, dan mampu menyalurkan kelebihan produksi pangan untuk memperoleh harga yang wajar. Kesadaran masyarakat akan pentingnya panganeragaman pangan dengan mutu pangan yang dikonsumsi harus semakin meningkat dalam mewujudkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga. Melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan (P2L) yang menyasar pada kelompok wanita tani/ibu rumah tangga/PKK supaya bisa memenuhi kebutuhan pangan skala rumah tangga.

o Pencapaian NSPK dan SPM

SPM Bidang Ketahanan Pangan pada tahun 2010-2015 menetapkan target capaian terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar yang harus dijabarkan lebih lanjut kedalam target capaian tahunan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yaitu: (1) ketersediaan dan cadangan pangan; (2) distribusi dan akses pangan; (3) panganekaragaman dan keamanan pangan; (4) penanganan kerawanan pangan. Capaian keempat pelayanan dasar tersebut diukur berdasarkan 7 indikator, yaitu:

- 1. Ketersediaan energi dan protein per kapita;
- 2. Penguatan cadangan pangan;
- 3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan;
- 4. Stabilitas harga dan pasokan pangan;
- 5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH);
- 6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan; dan
- 7. Penanganan daerah rawan pangan.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tersebut, Badan Ketahanan Pangan sebagai pembina teknis melakukan monitoring penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan, untuk mengetahui sejauh mana daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam melaksanakan SPM Bidang Ketahanan Pangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan SPM.

Dalam rangka percepatan penerapan SPM, upaya yang telah dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan, antara lain: (i) Melakukan Sosialisasi SPM Bidang Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota; (ii) Rapat Koordinasi dan Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan; dan (iii) Bimbingan Teknis SPM Bidang Ketahanan Pangan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan kendala, antara lain : (i) Belum dipahaminya dengan baik SPM Bidang Ketahanan Pangan serta kurangnya komitmen Pemerintah Daerah baik Bappeda maupun SKPD penanggung jawab di daerah; dan (ii) masih banyak provinsi dan kabupaten/kota yang belum mengintegrasikan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah mulai dari RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Rekapitulasi program dan kegiatan antara lain : 3 program dan 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2023.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- 2) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

Lokasi : Kabupaten Tabanan

2. Administrasi Keuangan

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD

Lokasi : Kabupaten Tabanan

3. Administrasi Umum

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 6) Penyediaan Bahan/Material
- 7) Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Lokasi : Kabupaten Tabanan

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Lokasi : Kabupaten Tabanan

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Lokasi : Kabupaten Tabanan

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Lokasi : Kabupaten Tabanan

2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.

Kegiatan :

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1) Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan

2) Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur

3) Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

Lokasi : Kabupaten Tabanan

3) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan :

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

1) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)

2) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

3) Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

4) Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

Lokasi : Kabupaten Tabanan

2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- 2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
- 3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Lokasi : Kabupaten Tabanan

3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita/ Tahun

Lokasi : Kab. Tabanan, 10 kecamatan

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Tabanan

Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu	Sumber		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan : Wajib									
	Bid Urusan : Pangan									
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Kab. Tabanan	100 %	Rp 4.537.207.550	APBD KAB		100 %	Rp 5.279.472.030
	A	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	Kab. Tabanan	3 dok	Rp 5.000.000	APBD KAB		3 dok	Rp 5.000.000
	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Tabanan	2 dok	Rp 3.000.000	APBD KAB		2 dok	Rp 3.000.000
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Tabanan	1 lap	Rp 2.000.000	APBD KAB		1 lap	Rp 2.000.000
	B	Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya	Kab. Tabanan	100%	Rp 4.079.716.000	APBD KAB		100%	Rp 4.608.201.000

			administrasi keuangan perangkat daerah							
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Tabanan	25 orang/bulan	Rp 4.074.716.000	APBD KAB		25 orang/bulan	Rp 4.603.201.000
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Kab. Tabanan	2 lap	Rp 5.000.000	APBD KAB		2 lap	Rp 5.000.000
	C	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tabanan	100%	Rp 136.500.000	APBD KAB		100%	Rp 199.250.000
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Tabanan	2 paket	Rp 2.500.000	APBD KAB		2 paket	Rp 3.000.000
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang	Kab. Tabanan	2 paket	Rp 6.500.000	APBD KAB		2 paket	Rp 7.000.000

			disediakan							
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket kebutuhan bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Tabanan	12 paket	Rp 49.000.000	APBD KAB		12 paket	Rp 49.500.000
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tabanan	4 paket	Rp 7.000.000	APBD KAB		4 paket	Rp 7.500.000
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Tabanan	2 dok	Rp 3.000.000	APBD KAB		2 dok	Rp 3.500.000
	6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Tabanan	7 paket	Rp 18.500.000	APBD KAB		7 paket	Rp 18.750.000
	7	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Tabanan	5 lap	Rp 50.000.000	APBD KAB		5 lap	Rp 50.000.000
	8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Tabanan	1 dok	Rp 0	APBD KAB		1 dok	Rp 10.000.000
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah	Presentase terpenuhinya	Kab. Tabanan	100%	Rp 50.000.000	APBD KAB		100%	Rp 50.000.000

		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah							
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Tabanan	5 unit	Rp 50.000.000	APBD KAB		5 unit	Rp 50.000.000
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tabanan	100%	Rp 230.995.900	APBD KAB		100%	Rp 214.000.000
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Tabanan	2 lap	Rp 1.000.000	APBD KAB		2 lap	Rp 1.000.000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Tabanan	12 lap	Rp 30.000.000	APBD KAB		12 lap	Rp 23.000.000
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Tabanan	12 lap	Rp 199.995.900	APBD KAB		12 lap	Rp 190.000.000

	F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Tabanan	100%	Rp 39.995.650	APBD KAB		100%	Rp 53.000.000
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Kab. Tabanan	7 unit	Rp 24.995.650	APBD KAB		7 unit	Rp 38.000.000
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Tabanan	10 unit	Rp 15.000.000	APBD KAB		10 unit	Rp 15.000.000
	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur pangan	Kab. Tabanan	100%	Rp 0	APBD KAB		100%	Rp 448.412.900
	A	Penyediaan Inrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai	Persentase penyediaan infrastruktur kawasan cadangan pangan terintegrasi	Kab. Tabanan	100%	Rp 0	APBD KAB		100%	Rp 448.412.900

		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang tersedia	Kab. Tabanan	1 unit	Rp 0	APBD KAB		1 unit	Rp 128.412.900
	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur yang tersedia	Kab. Tabanan	1 unit	Rp 0	APBD 3KAB		1 unit	Rp 50.000.000
	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	Kab. Tabanan	1 unit	Rp 0	APBD KAB		1 unit	Rp 270.000.000
	3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan	Kab. Tabanan	85 %	Rp 949.634.589	APBD KAB		85 %	Rp 1.137.773.627
	A	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan	Persentase ketersediaan dan penyaluran pangan	Kab. Tabanan	80%	Rp 174.634.589	APBD KAB		80%	Rp 507.773.627

		dan Harga Pangan								
	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Tabanan	1 lap	Rp 78.134.589	APBD KAB		1 data	Rp 81.273.627
	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	Kab. Tabanan	1 lap	Rp 50.000.000	APBD KAB		1 lap	Rp 380.000.000
	3	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Kab. Tabanan	1 dok	Rp 21.500.000	APBD KAB		1 dok	Rp 21.500.000
	4	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia yang dikembangkan	Kab. Tabanan	3 unit	Rp 25.000.000	APBD KAB		3 unit	Rp 25.000.000
	B	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase lokasi rentan rawan pangan yang tertangani	Kab. Tabanan	58%	Rp 225.000.000	APBD KAB		58%	Rp 275.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	Kab. Tabanan	3 lap	Rp 15.000.000	APBD KAB		3 lap	Rp 15.000.000
		Penyusunan Rencana	Rencana kebutuhan	Kab.	1 dok	Rp 60.000.000	APBD		1 dok	Rp 0

		Kebutuhan Pangan Lokal	pangan lokal	Tabanan			KAB			
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Kab. Tabanan	15 ton	Rp 150.000.000	APBD KAB		15 ton	Rp 265.000.000
	C	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian target konsumsi pangan	Kab. Tabanan	80%	Rp 550.000.000	APBD KAB		80%	Rp 350.000.000
	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kab. Tabanan	2 lap	Rp 300.000.000	APBD KAB		2 lap	Rp 320.000.000
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita/ Tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	Kab. Tabanan	1 lap	Rp 250.000.000	APBD KAB		1 lap	Rp 30.000.000
				JUMLAH		5.486.842.139				6.865.658.557

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan adalah penjabaran kegiatan tahunan dan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan tersebut tercapai sedikit tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP/LKJIP).

Rencana kerja tahun 2023 direncanakan untuk memberikan gambaran suatu kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Tabanan

Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
			Tahun 2023	
			Target	Rupiah (Rp)
Urusan : Wajib				
Bid Urusan : Pangan				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	4.537.207.550
A	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	3 dok	5.000.000
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	3.000.000
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 lap	2.000.000
B	Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	4.079.716.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang/bulan	4.074.716.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/	2 lap	5.000.000

	Kuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD		
C	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	136.500.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	2.500.000
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	6.500.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket kebutuhan bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	49.000.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	4 paket	7.000.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dok	3.000.000
6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	7 paket	18.500.000
7	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 lap	50.000.000
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dok	0
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	50.000.000
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang	5 unit	50.000.000

		disediakan		
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	230.995.900
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 lap	1.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikyang disediakan	12 lap	30.000.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 lap	199.995.900
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	39.995.650
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	7 unit	24.995.650
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	15.000.000
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur pangan	100%	0
A	Penyediaan Inrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan infrastruktur kawasan cadangan pangan terintegrasi	100%	0

1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang tersedia	1 unit	0
2	Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur	Jumlah lantai jemur yang tersedia	1 unit	0
3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	1 unit	0
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan	85%	949.634.589
A	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan dan penyaluran pangan	80%	174.634.589
1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 lap	78.134.589
2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	1 lap	50.000.000
3	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	1 dok	21.500.000
4	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia yang dikembangkan	3 unit	25.000.000
B	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase lokasi rentan rawan pangan yang tertangani	58%	225.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	3 lap	15.000.000
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan	Rencana kebutuhan pangan lokal	1 dok	60.000.000

	Lokal			
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	15 ton	150.000.000
C	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian target konsumsi pangan	80%	550.000.000
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	2 lap	300.000.000
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita/ Tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	1 lap	250.000.000
				5.486.842.139

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan dalam kurun waktu satu (1) tahun anggaran.

Dalam pelaksanaannya, Renja ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Adapun perencanaan yang telah dirumuskan oleh Dinas Ketahanan Pangan sedemikian rupa tetapi yang menjadi bahan pertimbangan terlaksananya program/kegiatan tersebut adalah penganggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Mengingat pembangunan yang selama ini dilaksanakan masih perlu pembenahan untuk mengefektifkan pencapaian tujuan. Tantangan ke depan yang lebih sulit karena dihadapkan pada menurunnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan sehingga penganggaran ditetapkan berdasarkan skala prioritas.

Pelaksanaan rencana kerja diawali dengan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun anggaran berikutnya, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang didalamnya sudah meliputi target indikator kinerja yang akan dicapai. Setelah DPA disahkan, OPD melaksanakan kegiatan berdasarkan pelaksanaan anggaran (PA) yang sudah dirumuskan per triwulan dalam satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja kegiatan dan capaian analisis kegiatan ditetapkan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dimana Indikator Kinerja meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) serta sasaran. Indikator-indikator tersebut bisa berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya.

Rencana tindak lanjut Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan rencana kerja adalah tetap berkoordinasi dengan instansi terkait baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat untuk usulan anggaran kegiatan dan mempersiapkan administrasi maupun survey CP/CL oleh bidang-bidang di Dinas Ketahanan Pangan.

Disadari bahwa untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan dan gizi tidaklah mudah, apalagi di era otonomi daerah, globalisasi dan perdagangan bebas. Oleh karena itu, semangat kedaulatan pangan dan kemandirian pangan harus tertanam dengan kokoh di setiap pelaku pembangunan ketahanan pangan agar diperoleh hasil yang optimal. Agar pembangunan ketahanan pangan dan gizi berjalan optimal maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, dan adanya partisipasi masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang menyentuh masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan keluarga

sampai tingkat perseorangan perlu diselaraskan dengan pembangunan ekonomi nasional, upaya pengentasan kemiskinan, dan responsif gender. Selanjutnya dengan dukungan sarana dan prasarana, serta kelembagan ketahanan pangan yang kuat maka diharapkan akan mampu mengakomodasikan kebutuhan pangan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya pangan yang tersedia.

Tabanan, 2 Agustus 2022
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tabanan,



Ni Dewa Ayu Putu Sri Widyanti, SP., M.Si.
Pembina Utama Muda /(IV/c)
NIP. 19681124 200212 2 004